PROSIDING
SENALA
Seminar Nasional
Linguistik Indonesia



Available online:
https://senala.upnjatim.ac.id
E-ISSN:
3123-335X
Prodi Linguistik Indonesia
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Submitted: 07/10/2026 Accepted: 01/11/2026 Published: 05/11/2026

Research Article

Analisis Linguistik Forensik Benturan Habitus dan Logika Korporasi dalam Ekosistem Birokrasi Episentrum Ibu Kota Nusantara

Ali Kusno*[1], Kundharu Saddhono[2], Raheni Suhita[3]
[1]Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur, [2]Prodi S3 Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Sebelas Maret, [3]FKIP Universitas Sebelas Maret, Indonesia
*Correspondence Author, E-mail: alikusno.kbkaltim@gmail.com

Abstract

Background: The relocation of the Nusantara Capital City (IKN) to East Kalimantan has fundamentally transformed the region into a sensitive national epicenter, shifting local public communication into the national spotlight. In this transitional governance ecosystem, official diction and institutional discourse significantly influence the stability of public perception. Nevertheless, profound communication crises have occurred alongside massive public protests on April 21, 2026. Purpose: This study aims to meticulously examine the sociolinguistic roots of this bureaucratic communication crisis by analyzing the phenomenon of habitus clash and the forceful application of corporate logic within the official statements of the Governor of East Kalimantan. Methods: Employing a forensic content analysis combined with a situation analysis single-case study design, this qualitative research utilizes sociopragmatics and Dell Hymes' SPEAKING model. It examines 6 purposively selected utterances from 18 documented utterance units collected from 1 official video recording and 7 online news reports during February–April 2026. Results: While institutional readings may view these statements as routine crisis clarifications, sociopragmatic and SPEAKING analyses indicate that the speaker's entrepreneurial background prominently manifests in pseudo-accommodation, statistical topic shifting, and referential narrowing when justifying facilities such as official vehicles, massage chairs, and marine aquariums. Forensically, these patterns do not prove malicious intent (mens rea), but strongly reflect linguistic insensitivity that potentially increases public distrust and cyber-dispute vulnerabilities. Conclusion: Uncalibrated corporate communication logic in regional bureaucracy risks eroding institutional legitimacy. Therefore, proactive mitigation of semantic risks is crucially needed to prevent mass cyber-dispute vulnerabilities and reconstruct transparent, empathetic public communication in the new capital epicenter.

Keywords: corporate logic, empathy dissonance, forensic linguistics, habitus clash, sociopragmatics,

PENDAHULUAN

Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah memicu pergeseran dalam lanskap sosiopolitik, budaya, yuridis, dan kebahasaan. Wilayah yang sebelumnya diposisikan sebagai daerah penyangga ini bertransformasi menjadi episentrum nasional yang menuntut standar tata kelola komunikasi publik yang ketat. Sebuah bahasa dalam ruang publik politik dan birokrasi bukan hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, melainkan medium untuk menyampaikan ideologi, membangun legitimasi, dan mengelola relasi kekuasaan (Rambe et al., 2026). Kusno (Wulandari, 2022) mengungkapkan bahwa urgensi penataan komunikasi publik di IKN sejalan dengan kebutuhan mendesak akan pembentukan infrastruktur sosial guna mengimbangi percepatan pembangunan infrastruktur fisik. Dalam konteks kerawanan inilah, linguistik forensik (LF) dituntut untuk proaktif sebagai pilar infrastruktur sosial; bukan sekadar instrumen reaktif untuk menelaah alat bukti hukum, melainkan sebagai upaya preventif untuk menjaga ketertiban sosial. Selain itu, dinamika wacana publik kini merepresentasikan ruang interaksi yang sarat polarisasi dan eskalasi ketegangan sosiopolitik. Panggung percakapan publik di Kaltim pada masa kepemimpinan Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, dan Wakil Gubernur, Seno Aji, pada semester 1 tahun 2026 dinilai penuh ketegangan. Kaltim muncul sebagai episentrum baru bagi pembicaraan politik nasional sebagai barometer kualitas kepemimpinan pada era transisi menuju IKN (Kusno, 2026c).

Krisis komunikasi publik di Kaltim merepresentasikan dinamika tata kelola wacana birokrasi yang berbenturan dengan tuntutan transparansi masyarakat sipil. Kesenjangan komunikasi ini terekam melalui serangkaian polemik diskursif, bermula dari klarifikasi reaktif pemerintah daerah yang berupaya merasionalisasi pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar serta renovasi fasilitas pimpinan daerah sebesar Rp25 miliar agar tidak memicu persepsi inefisiensi publik (Putsanra, 2026). Iklim komunikasi ini diperumit oleh tindak tutur bernada intimidatif dari lingkaran internal gubernur terhadap jurnalis ("tandai, tandai"), yang berpotensi mencederai kebebasan pers meski akhirnya dibingkai sekadar sebagai sebuah kesalahpahaman (Putsanra, 2026). Di samping itu, pengadaan fasilitas non-esensial berupa kursi pijat dan akuarium air laut melahirkan resistensi lanjutan. Kepala daerah berupaya meredam melalui permohonan maaf di media sosial dengan membingkai krisis tersebut semata-mata sebagai akibat dari "komunikasi yang tidak utuh" (Simanjorong, 2026). Kompleksitas wacana ini memuncak ketika pernyataan Gubernur Kaltim yang menyandingkan kebijakan penunjukan kerabatnya di Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) dengan figur kepemimpinan nasional justru memicu interpretasi negatif dan memperlebar jarak sosiologis di ruang publik (Simanjorong, 2026). Bahasa telah berevolusi menjadi instrumen keamanan strategis. Oleh karena itu, kesalahan pemilihan kata oleh pemangku kebijakan daerah tidak dapat lagi direduksi sekadar sebagai kekeliruan verbal prosedural, tetapi menjadi ancaman serius bagi legitimasi institusi. Dari perspektif LF, sebuah paradoks sosiolinguistik tengah bermanifestasi secara empiris di wilayah IKN ini (Kusno, 2026c).

Fenomena ini menunjukkan rangkaian polemik komunikasi yang berlangsung beriringan dengan eskalasi kritik memicu demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil Kaltim pada tanggal 21 April 2026. Aksi massa tersebut secara spesifik menuntut adanya audit kebijakan secara menyeluruh serta penghentian praktik inefisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Meskipun permohonan maaf institusional telah disampaikan secara terbuka untuk meredam eskalasi, sebagian elemen publik meresponsnya dengan skeptisisme yang belum menyentuh substansi etika komunikasi (Putsanra, 2026). Pada kasus tunggal yang dikaji dalam penelitian ini, yakni Gubernur Kaltim periode 2025–2029 yang berlatar

belakang sebagai pengusaha dan eksekutif korporasi (Simanjorong, 2026), krisis komunikasi tersebut patut diduga berkaitan dengan benturan habitus dan transposisi *"logika korporasi"* yang berwatak lugas, instruktif, transaksional, serta berorientasi pada hasil ke dalam ekosistem birokrasi kepemerintahan yang terikat pada etos pelayanan publik (Kusno, 2026b; (Fairclough, 1993). Belum tuntasnya adaptasi habitus korporat ini berisiko memicu kegagalan pragmatik dalam mengkalibrasi jarak sosial terhadap realitas sosio-ekonomi masyarakat akar rumput, sebagaimana tampak dalam diskursus justifikasi alokasi anggaran kendaraan dinas, renovasi rumah, hingga fasilitas non-esensial seperti akuarium (Putsanra, 2026).

Secara teoretis, konsep *habitus* merujuk pada sistem disposisi kognitif, skema persepsi, dan kebiasaan tindak tutur yang terinternalisasi dari rekam jejak sosial-profesional seorang aktor di ranah masa lalunya, yang tetap bertahan dan menstrukturkan praktik komunikasinya ketika memasuki ranah birokrasi publik (Kusno, 2026; Fairclough, 1993). Dalam transisi kepemimpinan dari sektor korporasi ke birokrasi negara, disposisi ini diklasifikasikan ke dalam tiga tipologi habitus beserta indikator pembedanya secara konseptual: (1) *habitus paternalistik-otoritatif digital*, yakni disposisi kepemimpinan hierarkis-kebapakan yang memadukan relasi patronase dengan mediasi teknologi searah, dengan indikator pembeda berupa penggunaan sapaan kekerabatan asimetris, pemberian predikat evaluatif-kuratorial dari posisi superior, pengalihan interaksi tatap muka ke saluran digital monologis, serta ketiadaan tindak tutur komisif yang menjanjikan koreksi substantif; (2) *habitus teknokratis-kalkulatif*, yakni disposisi rasionalitas instrumental yang mereduksi persoalan etika keadilan distributif menjadi kalkulasi pembukuan, dengan indikator pembeda berupa dominasi tindak tutur asertif berbasis komparasi statistik yang menonjolkan efisiensi relatif guna meredam keberatan publik atas kepatutan nominal absolut; serta (3) *habitus feodal-oligarkis (patrimonial)*, yakni disposisi kekuasaan berbasis kekerabatan yang memandang jabatan publik sebagai perpanjangan otoritas privat, dengan indikator pembeda berupa penggunaan leksikon ranah domestik/privat untuk menjustifikasi jabatan publik, penyandaran argumen pada analogi kekuasaan yang asimetris, serta klaim hak istimewa (*prerogatif*) untuk menutup perdebatan meritokrasi. Ketiga tipologi habitus tersebut beroperasi beriringan dengan *logika korporasi*, yaitu kolonisasi wacana birokrasi publik oleh *genre* komunikasi perusahaan swasta (*marketization of public discourse*) (Fairclough, 1993), yang diidentifikasi melalui tiga indikator pembeda: (a) *logika public relations/customer service korporat*, yang ditandai oleh tindak tutur direktif-prohibitif dan pelabelan negatif terhadap kritik warga layaknya penanganan keluhan pelanggan yang mengancam reputasi institusi; (b) *logika krisis manajemen korporat*, yang ditandai oleh tindak tutur komisif pengambilalihan beban finansial secara personal ala *Chief Executive Officer* (CEO) guna meredam krisis citra tanpa menyentuh evaluasi prosedur administrasi di hulu; dan (c) *logika tata kelola korporasi keluarga (family governance)*, yang ditandai oleh eufemisasi dan penyempitan rujukan simbol kehormatan institusi pada kemewahan aset material (*corporate branding*). Agar klasifikasi berjalan objektif, aturan pengodean (***coding rules***) menetapkan bahwa suatu tuturan hanya dapat dikategorikan ke dalam tipologi tersebut apabila memenuhi dua syarat secara simultan, yakni memuat penanda leksikal dan daya ilokusi spesifik pada tataran mikro-pragmatik (Saifudin, 2020; Rahardi, 2009) serta memperlihatkan ketidaksinkronan komponen konteks situasi tutur pada tataran makro SPEAKING (Iswatiningsih, 2016). Selanjutnya, mengingat latar belakang profesi masa lalu tidak secara otomatis membuktikan bahwa setiap klarifikasi berasal dari logika korporasi, diterapkan prosedur pemeriksaan interpretasi (***interpretation check***) melalui *pembacaan institusional tandingan* (*alternative institutional reading*) (Ashurov, 2026) dengan menguji penjelasan alternatif dalam komunikasi birokrasi normative, seperti fungsi apresiasi ketertiban umum, akuntabilitas berbasis bukti, pendelegasian staf kepercayaan, dan standar

keprotokolan, sebelum menetapkan adanya penyimpangan maksim kerja sama (Grice, 1975), maksim kesantunan (Leech, 1993; Rahardi et al., 2020; Culpeper, 2011), maupun ketidakcukupan pemulihan muka di ruang digital (Ismaeel, 2026).

Analisis LF memungkinkan beragam pendekatan untuk mengungkapkan pemaknaan pada alat bukti hukum (Kusno, 2025:17). Pendekatan Sosiopragmatik secara spesifik didayagunakan dalam kajian ini untuk membedah daya ilokusi, pelanggaran maksim kesantunan, serta fenomena pseudo-akomodasi yang direproduksi oleh pejabat daerah di ranah publik. Pendekatan Sosiopragmatik didayagunakan untuk membedah daya ilokusi, pelanggaran maksim, serta pseudo-akomodasi pejabat publik, yang berlandaskan pada dua pilar teoretis utama: Pertama, Prinsip Kerja Sama (Grice, 1975) yang mencakup Maksim Kuantitas (kecukupan informasi), Kualitas (kebenaran bukti), Relevansi (keterkaitan topik), dan Pelaksanaan/Cara (kejelasan diksi), digunakan untuk membongkar pengalihan isu (frame shift) serta pelanggaran informasi. Kedua, Prinsip Kesantunan (Leech, 1993; Rahardi, 2009) yang meliputi maksim Kearifan, Kedermawanan, Penerimaan, Kerendahan Hati, Kesepakatan, dan Simpati, digunakan untuk mengevaluasi pilihan diksi penutur, khususnya pelanggaran Maksim Penerimaan, guna mengukur tingkat ketidakpekaan berbahasa (*linguistic insensitivity*) serta potensi ancaman muka (*face loss*) di ruang publik. Pada dasarnya, analisis sosiopragmatik harus dikontekstualisasikan karena sebuah makna tuturan terjadi dalam lingkup sosial dan kultural tertentu yang berlaku variatif sesuai dengan situasi, status, dan kelas sosial penuturnya (Rahardi, 2009). Sosiopragmatik menjadi pisau bedah utama untuk mengungkapkan manipulasi strategi kesantunan, mendeteksi perilaku tutur yang bersifat melecehkan muka, dan membongkar tindakan komunikasi yang secara intensional membuat publik merasa kehilangan muka (*face loss*) akibat tingginya disonansi empati sang pejabat (Rahardi et al., 2020; Culpeper, 2011). Dalam ranah digital, kegagalan pemulihan muka ini justru memicu ancaman muka akibat minimnya strategi hipermitigasi (Ismaeel, 2026).

Sebagai instrumen pendamping yang esensial, model etnografi komunikasi SPEAKING dari Dell Hymes diterapkan untuk membedah anatomi situasi tutur secara lebih makro dan komprehensif. Kajian perilaku komunikatif ini menganalisis satuan interaksi masyarakat tutur secara berjenjang, yang dimulai dari situasi tutur (*speech situation*), peristiwa tutur (*speech event*), hingga tindak tutur (*speech act*) sebagai perangkat analisis intinya (Iswatiningsih, 2016). Kedelapan komponen analitik, yang meliputi *Setting and Scene* (latar dan suasana), *Participants* (peserta tutur), *Ends* (tujuan), *Act sequence* (urutan tindak), *Key* (nada tutur), *Instrumentalities* (sarana), *Norms* (norma interaksi dan interpretasi), dan *Genre* (jenis tutur), difungsikan untuk membongkar anomali konteks ekstralingual yang melatari kegagalan komunikasi pejabat (Iswatiningsih, 2016). Integrasi antara sosiopragmatik dan model SPEAKING pada akhirnya membuahkan sintesis LF yang mampu mengekskavasi benturan habitus dan patologi komunikasi secara mendalam. Linguistik forensik sebagai ilmu terapan yang bersinggungan langsung dengan ranah hukum memiliki tugas krusial untuk mengungkap makna leksikal, makna pragmatik, hingga ambiguitas gramatikal di balik tuturan formal birokrasi (Coulthard & Johnson, 2007; Mintowati, 2016). Perpaduan kedua kerangka teoretis ini membuktikan secara ilmiah bagaimana pemaksaan agresif logika korporasi di dalam birokrasi transisional dapat menghancurkan legitimasi politik dan memicu lahirnya embrio delik pidana maupun siber (Hartini et al., 2020).

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa penelitian LF terdahulu memiliki kecenderungan kuat untuk memosisikan teks sekadar sebagai objek pasif. Analisis kebahasaan umumnya baru dieksekusi pasca-peristiwa (*post-factum*) atau ketika sebuah perkara pidana telah resmi bergulir di ranah peradilan (Coulthard & Johnson, 2007; Kusno, 2021). Kajian LF belum didayagunakan secara preventif untuk mengungkap akar sosiologis berupa benturan habitus

penguasa di wilayah transisi geopolitik yang krusial ini. Penelitian ini memosisikan pendekatan analitiknya sebagai perangkat diagnostik komprehensif sejak hulu perencanaan komunikasi. Penelitian ini tidak hanya membedah pelanggaran norma kesantunan, tetapi juga menempatkan analisis kebahasaan sebagai instrumen evaluasi atas krisis komunikasi birokrasi. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan LF modern yang bukan lagi sekadar membedah teks hukum secara statis, melainkan mengevaluasi bagaimana pilihan tuturan institusional membentuk legitimasi dan merefleksikan hierarki kekuasaan (Hussain, M., Khan, U., & Khan, 2025). Oleh karena itu, tujuan utama kajian ini dirumuskan untuk mendiagnosa sekaligus mengekskavasi secara forensik dominasi logika korporasi dalam wacana pejabat publik di episentrum IKN. Secara spesifik, penelitian ini berupaya membongkar patologi komunikasi yang memantik resistensi komunal guna memitigasi risiko hukum dan menyelamatkan legitimasi birokrasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Moleong, 1994) dengan desain analisis isi forensik yang dipadukan dengan Studi Kasus Analisis Situasi (*situation analysis case study*) (Hayati, 2019; Ilhami et al., 2024). Pendekatan studi kasus diterapkan sebagai strategi penyelidikan empiris untuk menganalisis fenomena sosial kontemporer yang sedang diperbincangkan di masyarakat secara mendalam, utuh, dan tanpa adanya kontrol atau intervensi peneliti terhadap peristiwa tersebut (Hayati, 2019; Ilhami et al., 2024). Fokus eksplorasi diarahkan untuk menjawab pertanyaan *how* (bagaimana struktur tuturan serta manifestasi habitus dan logika korporasi terjadi) serta *why* (mengapa strategi komunikasi publik pejabat berkaitan dengan eskalasi polemik wacana) di episentrum Ibu Kota Nusantara (IKN) (Ilhami et al., 2024).

Data dalam penelitian ini berupa unit lingual (kata, frasa, klausa, dan tuturan) dari pernyataan lisan maupun tertulis Gubernur Kaltim periode 2025–2030, Rudy Mas'ud, pada rentang waktu Februari hingga April 2026. Penentuan batasan kasus (*bounding the case*) dilakukan secara ketat pada satu kasus tunggal (***single-case study***) berdasarkan aspek waktu, rentang peristiwa krisis, dan proses interaksi publik (Ilhami et al., 2024). Oleh karena subjek penelitian dibatasi pada satu aktor kepala daerah, seluruh temuan dan simpulan dalam kajian ini hanya merepresentasikan kasus yang diteliti dan tidak digeneralisasikan secara demografis kepada seluruh pejabat publik di Kaltim. Fokus peristiwa diarahkan pada respons resmi kepala daerah terhadap polemik pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar, renovasi rumah dinas sebesar Rp25 miliar, pengadaan fasilitas non-kedinasan (kursi pijat dan akuarium air laut), penunjukan kerabat dalam Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP), anggaran makan dan minum pemerintah provinsi senilai Rp10,24 miliar, serta aksi protes masyarakat sipil tanggal 21 April 2026 (Putsanra, 2026; Simanjorong, 2026; Saputra, 2026; Rahayu, 2026; *Daftar Kontroversi Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Berujung Aksi 21 April*, 2026).

Pengumpulan data dieksekusi melalui metode simak, dokumentasi literatur, dan teknik catat yang dilengkapi prosedur transkripsi ortografis terhadap rekaman audiovisual pernyataan resmi pejabat. Secara keseluruhan, dokumentasi sumber data meliputi 1 rekaman video pernyataan resmi di akun media sosial *Instagram* (@rudymasud, diunggah pada 21 April 2026) dan 7 artikel berita daring terverifikasi (*CNN Indonesia*, *Tirto.id*, *DetikKalimantan*, *BangkaPos/Tribunnews*, *TribunMedan*, dan *Kaltim Post* yang diterbitkan pada rentang 21–29 April 2026), yang di dalamnya memuat total 18 unit tuturan klarifikasi Gubernur Kaltim. Dari keseluruhan 18 unit tuturan yang terdokumentasi, ditetapkan 6 unit tuturan sebagai contoh terpilih (***purposive sample***) untuk dianalisis secara mendalam pada bagian hasil dan

pembahasan. Pemilihan keenam sampel tersebut didasarkan pada dua kriteria: (1) tuturan merepresentasikan respons langsung kepala daerah terhadap setiap isu utama pemicu polemik Februari–April 2026, dan (2) tuturan memiliki kelengkapan konteks peristiwa tutur serta penanda leksikal-pragmatik yang paling representatif untuk menguji masing-masing subkategori analisis. Pada penyajian data, setiap paparan dilengkapi penanda sumber yang membedakan Transkripsi Rekaman Video dari Kutipan Berita Media, disertai tanggal publikasi dan rujukan sumbernya.

Prosedur pelaksanaan penelitian mengadopsi tahapan sistematis studi kasus kualitatif yang meliputi pemilihan kasus, pengumpulan data, analisis data, pemeriksaan interpretasi/verifikasi, dan penulisan laporan ilmiah (Ilhami et al., 2024). Pada tahap analisis, data diproses mengadaptasi Model Interaktif (Miles et al., 2014) melalui tiga komponen terintegrasi:

1. **Reduksi dan Pengodean Data (*Data Reduction*):** Mengidentifikasi, mengode, dan mengklasifikasikan unit tuturan berdasarkan operasionalisasi konsep *habitus* dan *logika korporasi*. Konsep *habitus* dalam penelitian ini didefinisikan sebagai sistem disposisi kognitif dan gaya komunikasi yang terbentuk dari rekam jejak sosial-profesional penutur sebagai pengusaha serta eksekutif korporasi swasta yang terbawa ke dalam jabatan publik (Kusno, 2026a; Simanjorong, 2026). Konsep *logika korporasi* didefinisikan sebagai kolonisasi wacana birokrasi oleh genre komunikasi perusahaan swasta (*marketization of public discourse*), yang meliputi manajemen kesan (*impression management*), penanganan keluhan pelanggan (*customer service*), pengambilalihan beban secara finansial-personal, dan pencitraan merek (*corporate branding*) (Fairclough, 1993).
2. **Penyajian Data dan Pemeriksaan Interpretasi (*Data Display*):** Menganalisis data yang tereduksi menggunakan pendekatan Sosiopragmatik (Rahardi, 2009) untuk menguji daya ilokusi tindak tutur (Saifudin, 2020), pemenuhan atau penyimpangan Prinsip Kerja Sama yang mencakup Maksim Kualitas dan Maksim Relevansi (Grice, 1975), Prinsip Kesantunan yang mencakup Maksim Kesimpatian dan Maksim Penerimaan (Leech, 1993; Rahardi et al., 2020; Culpeper, 2011), serta fungsi pragmatik permohonan maaf, pemulihan muka (*face-repairing act*), dan *pseudo-akomodasi* di ruang digital (Ismaeel, 2026). Analisis sosiopragmatik ini dipadukan dengan Model Etnografi Komunikasi SPEAKING Dell Hymes (Iswatiningsih, 2016) untuk membedah kedelapan komponen situasi tutur (*setting and scene, participants, ends, act sequence, key, instrumentalities, norms, genre*) secara komprehensif. Mengingat latar belakang pengusaha belum dengan sendirinya membuktikan bahwa strategi klarifikasi berasal dari logika korporasi, prosedur analisis dilengkapi dengan **pemeriksaan interpretasi melalui pembacaan institusional tandingan (*alternative institutional reading*)**. Setiap tuturan diuji terlebih dahulu menggunakan penjelasan alternatif dalam komunikasi birokrasi normatif, lalu dievaluasi berdasarkan ciri tekstual dan konteks ekstralingualnya untuk mengidentifikasi implikatur yang berpotensi memicu disfungsi komunikasi publik (Ashurov, 2026).
3. **Penarikan Simpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*):** Merumuskan sintesis linguistik forensik dengan memisahkan evaluasi kebahasaan dari penetapan hukum positif oleh peradilan, membatasi inferensi motif penutur pada perilaku kebahasaan teramati berupa ketidakpekaan linguistik (*linguistic insensitivity*) tanpa mengklaim adanya kesengajaan atau niat jahat (*mens rea*), memetakan potensi disonansi informasi administratif dan kerentanan delik siber sebagai kemungkinan kontekstual berdasarkan urutan peristiwa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Peristiwa Tutur: Pemetaan Etnografi Komunikasi *SPEAKING*

Dinamika sosiopolitik di wilayah Kaltim sebagai episentrum Ibu Kota Nusantara (IKN) telah melahirkan lanskap komunikasi publik yang sensitif dan rentan terhadap friksi sosial. Secara makro, rangkaian krisis komunikasi ini dipetakan secara objektif melalui model etnografi komunikasi SPEAKING dari Dell Hymes sebagai fondasi analisis. Latar peristiwa (*Setting and Scene*) berlangsung dalam pusaran masa transisi tata kelola kewilayahan yang diwarnai oleh ketegangan psikologis antara masifnya pembangunan fasilitas elitis dan realitas sosial-ekonomi masyarakat lokal. Ketegangan tersebut semakin menguat mengingat kondisi infrastruktur dasar, seperti jalan raya antarkabupaten yang masih membutuhkan perhatian serius. Dalam ruang interaksi yang asimetris ini, aktor sentral (*Participants*) yang memproduksi wacana adalah Gubernur Kaltim periode 2025–2030, Rudy Mas'ud. Ia bukan sekadar birokrat, melainkan pemangku kebijakan dengan rekam jejak panjang sebagai pengusaha minyak dan gas dari klan bisnis “Mas'ud Brothers”, serta mantan eksekutif di berbagai korporasi besar (Simanjorong, 2026). Latar belakang wirausaha inilah yang diduga membentuk habitus kepemimpinannya ketika berhadapan langsung dengan mahasiswa, kelompok sipil, dan *netizen*. Benturan wacana pun mulai terjadi secara sistematis ketika tujuan (*Ends*) masyarakat sipil yang menuntut transparansi dan keadilan fiskal justru direspons melalui genre (*Genre*) klarifikasi politis yang kaku dan bersifat searah.

Rangkaian tindak tutur (*Act sequence*) dalam krisis ini berawal dari polemik justifikasi anggaran fasilitas kemewahan institusi, yang salah satu puncaknya adalah kontroversi pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar pada akhir Februari 2026 (Simanjorong, 2026). Pengadaan tersebut memantik perdebatan luas karena dinilai kontradiktif dengan semangat efisiensi anggaran di tengah karut-marutnya fasilitas publik daerah. Polemik mobil dinas dan pembelaan terhadap penunjukan kerabat dalam struktur birokrasi ini kemudian memicu eskalasi demonstrasi massa pada 21 April 2026. Alih-alih menemui masyarakat secara langsung di ruang publik, Gubernur merespons krisis tersebut menggunakan sarana komunikasi virtual (*Instrumentalities*) berupa platform media sosial dan rilis berita sektoral. Manuver panggung belakang ini menghasilkan nada tuturan (*Key*) yang defensif, instruksif, dan sarat dengan nuansa elitisme korporat.

Benturan struktural ini memicu kegagalan pada komponen norma interpretasi yang melahirkan disonansi empati. Masyarakat memaknai pengadaan mobil dinas tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap mandat kesejahteraan, terutama ketika dihadapkan pada penderitaan empiris akibat infrastruktur yang rusak. Sebaliknya, Sang Gubernur yang terbiasa beroperasi dengan paradigma *Chief Executive Officer* (CEO) justru menafsirkan kemewahan operasional tersebut sebagai “marwah” atau sekadar investasi reputasi demi menjaga wibawa institusi di mata tamu IKN. Perbedaan diametral dalam menafsirkan kepatutan etis inilah yang mengunci rapat ruang dialog deliberatif. Kacamata untung-rugi ala pengusaha membuat Gubernur mengalami bias sosiologis karena gagal membaca kemarahan warga sipil yang sesungguhnya.

Pemetaan makro terhadap kedelapan komponen situasi tutur tersebut baru memberikan sebuah gambaran awal yang esensial. Deskripsi kontekstual ini dirancang sebagai pijakan analitis untuk menggali aspek yang lebih mendalam mengenai Benturan Habitus dan Logika Korporasi pada subbab-subbab berikutnya. Melalui landasan tersebut, patologi komunikasi Gubernur Kaltim dapat dibongkar secara komprehensif, akademis, dan proporsional.

Kategorisasi Habitus Pejabat Publik

Bagian ini memetakan bagaimana latar belakang sosiologis dan disposisi komunikatif para pemangku kebijakan membentuk pola respons diskursif ketika menghadapi krisis legitimasi di wilayah episentrum IKN. Sesuai dengan aturan pengodean dan pemeriksaan interpretasi, penelusuran terhadap habitus penguasa melalui kacamata sosiopragmatik dan etnografi komunikasi dilakukan tanpa apriori; pembacaan tandingan (*alternative institutional reading*) selalu diuji terlebih dahulu untuk membongkar mengapa kebijakan publik seringkali diterjemahkan melalui wacana yang berjarak dari konteks sosial masyarakat setempat.

Habitus Paternalistik-Otoritatif Digital

Secara konseptual-sosiologis, habitus paternalistik merupakan sistem disposisi kognitif dan budaya birokrasi yang telah terinternalisasi secara historis, ketika pemimpin memosisikan diri sebagai patron superior yang memiliki otoritas mutlak, sementara masyarakat atau bawahan ditempatkan pada posisi ketergantungan yang subordinat (Carolina, L. A., & Mukti, 2020) (Hasbullah, H., & Wahyono, 2020). Ketika budaya kepemimpinan ini berpadu dengan pemanfaatan platform teknologi komunikasi searah, lahirlah habitus paternalistik-otoritatif digital. Dalam ekosistem ini, pengawasan kritis dari masyarakat sipil tidak dipandang sebagai hak deliberatif yang setara, melainkan disikapi layaknya ketidakpatuhan yang harus dikendalikan dan ditenangkan melalui *pseudo-akomodasi* (Kusno, 2026a). Menghadapi eskalasi aksi unjuk rasa terkait tuntutan transparansi anggaran, pejabat publik kerap merespons tekanan sosial tersebut dengan memanifestasikan habitus ini di ruang digital.

Paparan Data 1 [Transkripsi Rekaman Video pernyataan resmi di akun Instagram @rudymasud, diunggah pada 21 April 2026; dikutip pula dalam berita *CNN Indonesia*, 21 April 2026]:

> *"Terima kasih masukan adik-adik mahasiswa, lapisan masyarakat, dan seluruh elemen-elemen yang menjadi tetap kontrol sosial. Masukan hari ini berarti dan berkelas."* (Respons via video Instagram menyikapi demonstrasi 21 April 2026) (*Gubernur Kaltim Respons Aksi 21 April: Masukannya Sangat Berkelas*, 2026).

Secara tekstual dan sosiopragmatik, tuturan apresiatif tersebut dipelajari melalui pembacaan institusional tandingan (*alternative institutional reading*) sebagai bentuk apresiasi normatif untuk menjaga ketertiban umum. Namun, pengujian lebih lanjut menunjukkan bahwa pengalihan latar interaksi ke panggung virtual ini memperlihatkan penghindaran dari ruang publik fisik saat menghadapi tekanan massa. Dari sudut pandang sosiopragmatik, tuturan apresiatif tersebut merupakan bentuk *pseudo-akomodasi* (akomodasi semu) yang secara demonstratif menyimpangi Maksim Kesimpatian (*Sympathy Maxim*). Alih-alih menunjukkan empati terhadap substansi kemarahan massa, Gubernur memposisikan diri sebagai pihak superior yang mengkurasi atau menilai tinggi-rendahnya kualitas kritik warga. Pelanggaran prinsip kesantunan ini memperkuat indikasi bahwa dialog deliberatif dibatasi demi menjaga stabilitas citra personal penguasa di hadapan publik maya. Tindakan ini beroperasi sebagai instrumen penyelamatan muka positif dalam wacana politik adversarial, yang belum menyentuh penyelesaian konflik secara substansial.

Analisis menggunakan model SPEAKING mengungkap terjadinya pergeseran konteks yang dilakukan Gubernur melalui instrumen latar tutur (*Setting/Scene*). Gubernur secara sepihak memindahkan latar interaksi dari ruang demonstrasi fisik yang horizontal ke platform digital yang asimetris dan searah. Nada atau semangat tuturan (*Key*) yang bernada merendah dan memuji memunculkan ironi karena menutupi ketidakhadiran fisik pejabat di tengah episentrum krisis. Penggunaan medium video Instagram ini secara langsung membatasi

norma interaksi (*norms of interaction*), ketika massa aksi kehilangan ruang untuk memberikan interupsi secara langsung. Secara pragmatis, esensi perlawanan sosial direduksi dengan mengubah posisi rakyat menjadi sekadar penonton pasif. Pergeseran panggung komunikasi secara sistematis memarginalkan peran partisipan (*Participants*). Rakyat yang semula hadir sebagai agen penuntut akuntabilitas diubah posisinya layaknya entitas komersial yang seolah cukup ditenangkan dengan pujian permukaan. Tujuan (*Ends*) dari peristiwa tutur ini berorientasi pada strategi manajemen kesan yang identik dengan gaya korporasi, bukan resolusi administratif birokrasi. Oleh karena itu, habitus paternalistik ini merefleksikan cara pandang yang belum menempatkan warga sebagai mitra dialog setara, sehingga menegaskan adanya jarak sosiologis antara penguasa elitis dan warga negara.

Berdasarkan sintesis linguistik forensik, pola tutur tersebut tidak merepresentasikan niat jahat (*mens rea*), tetapi mencerminkan ketidakpekaan linguistik (*linguistic insensitivity*) dalam mengkalibrasi jarak sosial antara Gubernur dan warga. Pemanfaatan panggung virtual monologis ini berfungsi sebagai instrumen manajemen kesan yang secara sosiolinguistik membatasi ruang dialog deliberatif di ruang publik. Akibatnya, disonansi empati yang ditimbulkannya berpotensi memperlebar jarak sosiologis, meningkatkan kerentanan sengketa siber, serta menggerus kepercayaan publik (*public trust*) terhadap legitimasi institusi pemerintahan daerah.

Habitus Teknokratis-Kalkulatif

Secara konseptual, habitus teknokratis-kalkulatif dalam tata kelola birokrasi berakar pada dominasi rasionalitas instrumental (*instrumental rationality*), yakni sistem disposisi yang secara sistematis mereduksi persoalan etika kepatutan, keadilan distributif, dan moralitas publik menjadi sekadar kalkulasi efisiensi manajerial serta statistik numerik (Denhardt, J. V., & Denhardt, 2004; Zhang, 2021). Dalam kerangka pikir ini, pejabat publik cenderung merespons kritik tata kelola dengan mengedepankan justifikasi berbasis tren angka, sembari mengabaikan rasionalitas kultural yang berbasis pada nilai (*value rationality*) di masyarakat. Sorotan publik terhadap rasionalitas nilai ini kembali menguat ketika media massa mempublikasikan data alokasi belanja makan dan minum Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2026 yang mencapai sekitar Rp10,24 miliar.

Paparan Data 2 [Kutipan Berita Media Daring *CNN Indonesia* dan *DetikKalimantan*, diterbitkan pada 26 April 2026]:

> *"Belanja makan minum pada 2023 berada di angka Rp12,33 miliar. Kemudian naik di 2024 menjadi Rp15,89 miliar, namun kembali turun pada 2025 menjadi Rp11,93 miliar... Untuk 2026 malah turun lagi jadi sekitar Rp10,24 miliar. Jadi tren-nya menurun."* (Justifikasi anggaran makan) (Anggaran Makan Pemprov Rp10 Miliar, Ini Kata Gubernur Kaltim, 2026; Rahayu, 2026).

Secara tekstual dan sosiopragmatik, klarifikasi berbasis statistik tersebut dipelajari melalui pembacaan institusional tandingan (*alternative institutional reading*) sebagai bentuk akuntabilitas birokrasi berbasis bukti (*evidence-based clarification*) untuk menjelaskan riwayat penghematan anggaran secara objektif. Namun, pengujian lebih lanjut menunjukkan bahwa habitus teknokratis-kalkulatif membentuk disposisi komunikatif ketika persoalan etika kepatutan dan keadilan distributif secara sistematis direduksi menjadi deretan angka statistik semata. Dari kacamata sosiopragmatik (Rahardi, 2009), penutur memproduksi tindak tutur asertif yang berupaya meredam kritik publik melalui pemaparan rasionalitas numerik. Pendekatan ini memperlihatkan kendala dalam membaca jarak sosial antara kondisi elitis penguasa dan realitas sosial-ekonomi masyarakat akar rumput. Penutur kurang

memperhitungkan bahwa nominal absolut belasan miliar rupiah untuk konsumsi internal, meskipun secara relatif diklaim menurun, tetap menyinggung nurani publik sehingga pembelaan angka ini menyimpangi Maksim Kesimpatian (*Sympathy Maxim*) dan justru memperlebar disonansi empati.

Analisis menggunakan model SPEAKING (Iswatiningsih, 2016) mengungkap bagaimana alur pesan (*Act sequence*) disusun untuk menonjolkan tren penurunan statistik dari awal hingga akhir tuturan. Tujuan utama (*Ends*) dari rentetan peristiwa tutur ini diarahkan untuk memenangkan perdebatan secara rasional sekaligus meredam sentimen penolakan dari warga. Akan tetapi, penguasa dan publik memiliki benturan pada norma interpretasi (*Norms of interpretation*) terkait prinsip keadilan fiskal. Masyarakat memprotes besaran absolut nominal anggaran, sementara pejabat meresponsnya dengan ukuran efisiensi relatif yang kaku dan mekanis. Kegagalan sinkronisasi konteks ini menciptakan asimetri komunikasi di ruang publik, di mana birokrasi memposisikan warganya layaknya pihak yang kurang memahami kerumitan tata kelola anggaran (*Participants* dan *Instrumentalities*). Pejabat yang terbiasa menelaah laporan pembukuan komersial berupaya menerjemahkan instrumen tersebut ke ranah publik, yang justru mengonfirmasi bahwa tata kelola birokrasi sedang dinarasikan melalui orientasi kalkulasi untung-rugi.

Berdasarkan temuan analisis sosiopragmatik dan pemetaan SPEAKING di atas, simpulan subbab ini menunjukkan bahwa pola tutur tersebut tidak merepresentasikan niat jahat (*mens rea*), tetapi mewujudkan *linguistic insensitivity* (ketidakpekaan linguistik) dalam menarasikan akuntabilitas anggaran publik. Pemanfaatan rasionalitas numerik yang mereduksi keadilan distributif beroperasi sebagai pembelaan teknokratis yang gagal menjembatani jarak sosial dengan masyarakat lokal. Sebagai temuan utama, klarifikasi berbasis statistik yang mekanis ini terbukti memperlebar disonansi empati, memicu resistensi lanjutan, serta menggerus legitimasi moral institusi pemerintahan daerah.

Habitus Feodal-Oligarkis (Patrimonial-Kekerabatan)

Secara konseptual, habitus feodal-oligarkis dalam ekosistem pemerintahan merupakan manifestasi dari praktik neo-patrimonialisme birokrasi, sebuah kondisi di mana struktur administratif formal-legal disusupi oleh relasi kekuasaan tradisional yang mengekstraksi kewenangan negara untuk tujuan patronase (Erdmann, G., & Engel, 2006). Dalam literatur kajian administrasi negara, sistem birokrasi yang didikte oleh budaya patrimonial ini cenderung mengabaikan asas meritokrasi profesional dan justru melembagakan loyalitas politik serta kedekatan personal (Pasaribu, E., & Syamsuri, 2025). Akibatnya, penguasa mereduksi rasionalitas organisasi publik menjadi ekstensi dari keistimewaan keluarga (*privatization of public affairs*) yang meruntuhkan batasan antara kewenangan privat dan tanggung jawab kepemerintahan publik (Okolie, 2012). Ketidakpekaan dalam mengkalibrasi jarak antara urusan privat dan publik inilah yang secara nyata memicu polemik ketika kepala daerah menunjuk adik kandungnya sebagai Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP).

Paparan Data 3 [Kutipan Berita Media Daring *BangkaPos/Tribunnews*, diterbitkan pada 24 April 2026]:

> *"Kadang ada di Jakarta nanti yang handle di sini siapa? karena ada hal yang sifatnya privasi misalkan logistik atau mandat yang tidak bisa diwakilkan... Sama, Pak Hashim juga begitu. Apa bedanya Pak Hashim dengan Bapak Presiden, kan dia percayakan, itu memang hak prerogratif."* (Pembelaan penunjukan adik sebagai Wakil Ketua TAGUPP) (Saputra, 2026).

Secara tekstual dan sosiopragmatik, pembelaan penunjukan kerabat tersebut dipelajari melalui pembacaan institusional tandingan (*alternative institutional reading*) sebagai penjelasan fungsional bahwa pimpinan eksekutif membutuhkan staf penasihat dengan tingkat kepercayaan personal yang tinggi (*trust-based appointment*), sembari merujuk pada preseden pelibatan kerabat di tingkat nasional. Namun, pengujian lebih lanjut menunjukkan bahwa habitus feodal-oligarkis melahirkan disposisi wacana di mana jabatan publik dipandang sebagai kepanjangan dari privilese kekerabatan. Dari kacamata sosiopragmatik, tuturan yang membandingkan penunjukan kerabat di daerah dengan figur eksekutif nasional ini mengandung daya ilokusi asertif-justifikatif yang dominan. Penutur menggeser fokus perdebatan (*frame shift*) yang secara pragmatis menyimpangi prinsip kerja sama Grice, khususnya Maksim Relevansi, dengan menyandarkan argumen pada analogi kekuasaan yang bersifat asimetris. Praktik kebahasaan ini memperlihatkan bahwa ruang birokrasi sedang didekati dengan kerangka pengelolaan privat (ditandai oleh pemilihan leksikon *"privasi"*), yang berbenturan dengan tuntutan asas meritokrasi publik.

Pendekatan etnografi komunikasi SPEAKING membongkar terjadinya pergeseran kerangka wacana di mana penutur berupaya mengarahkan pemahaman khalayak (*Participants*) menggunakan tokoh nasional sebagai tameng retorika. Nada tuturan (*Key*) yang lugas dan defensif melalui kalimat tanya retoris (*"Apa bedanya..."*) disusun sebagai argumen pengunci perdebatan. Tujuan (*Ends*) dari peristiwa tutur ini berorientasi pada pengamanan keputusan penunjukan kekerabatan, yang berbenturan dengan etika pencegahan konflik kepentingan di lingkungan pemerintahan. Pemanfaatan leksikon *"hak prerogratif"* sebagai sarana linguistik (*Instrumentalities*) berfungsi membatasi wacana diskursif terkait isu patronase. Konsekuensinya, norma interaksi dan interpretasi (*Norms*) yang semestinya dilandasi asas transparansi merit-sistem justru bergeser menjadi wacana otoritatif yang mereduksi partisipasi pengawasan dari kelompok masyarakat sipil.

Berdasarkan temuan analisis sosiopragmatik dan pemetaan SPEAKING di atas, simpulan subbab ini menunjukkan bahwa pola tutur tersebut tidak merepresentasikan niat jahat (*mens rea*), tetapi mencerminkan *linguistic insensitivity* dalam menarasikan etika rekrutmen jabatan publik. Penggunaan analogi kekuasaan nasional dan leksikon ranah privat untuk menjustifikasi patronase keluarga beroperasi sebagai disonansi informasi administratif yang membatasi hak uji publik. Sebagai temuan utama, argumen pembelaan yang menafikan prinsip meritokrasi ini berpotensi memicu resistensi komunal, memperlebar jarak sosiologis, serta menggerus kepercayaan masyarakat terhadap integritas kelembagaan di daerah.

Kategorisasi Logika Korporasi

Bagian ini menguraikan bagaimana instrumen komunikasi, terminologi, dan taktik manajemen penanganan krisis dari entitas bisnis swasta ditransposisikan secara langsung ke dalam ruang birokrasi pemerintahan daerah (*marketization of public discourse*) ketika merespons kritik dari warga negara.

Logika Public Relations / Customer Service Korporat

Secara teoretis, adopsi logika korporasi dalam ranah birokrasi publik merupakan bentuk kolonisasi wacana oleh genre komunikasi bisnis swasta, sebuah fenomena yang dalam kajian diskursus kritis didefinisikan sebagai *marketization of public discourse* (Fairclough, 1993). Pergeseran ini didorong oleh penetrasi paradigma *New Public Management* (NPM) yang mentransformasikan orientasi pelayanan negara menjadi berakar pada efisiensi manajerial ala korporasi (Hood, 1991). Dalam kerangka analitis tersebut, institusi pemerintah yang mengadopsi model komunikasi komersial cenderung memperlakukan kritik masyarakat sipil

bukan sebagai hak pengawasan demokratis, melainkan disikapi layaknya komplain konsumen yang mengancam reputasi kelembagaan (*brand image*) sehingga harus direspons melalui instrumen kehumasan yang defensif. Fenomena diskursif ini tergambar pada polemik anggaran makan dan minum pemerintah provinsi senilai Rp10,24 miliar pada akhir April 2026, ketika kepala daerah memberikan tanggapan secara terbuka mengenai cara masyarakat dan media membingkai isu anggaran tersebut.

Paparan Data 4 [Kutipan Berita Media Daring *DetikKalimantan*, diterbitkan pada 26 April 2026]:

> *"Kalau salah, ya diperbaiki, tapi jangan dibakar jadi isu yang tidak benar."* (Respons terkait kritik anggaran makan Pemprov senilai Rp10 miliar) (Rahayu, 2026).

Secara tekstual dan sosiopragmatik, pernyataan tersebut dipelajari melalui pembacaan institusional tandingan (*alternative institutional reading*) sebagai bentuk kesiapan melakukan koreksi administratif sekaligus imbauan wajar agar diskursus publik tetap proporsional dan terhindar dari disinformasi. Namun, pengujian lebih lanjut menunjukkan bahwa pola tutur ini mengadopsi logika *public relations* yang memperlakukan pengawasan dari publik sipil selayaknya komplain pelanggan di ranah privat. Secara sosiopragmatik (Rahardi, 2009), penggunaan frasa direktif-prohibitif *"jangan dibakar jadi isu yang tidak benar"* beroperasi sebagai bentuk pembatasan wacana yang menganggap pengawasan kritis sebagai gangguan institusional. Tuturan ini secara tidak langsung menyimpangi Maksim Penerimaan (*Approbation Maxim*) karena menyematkan atribusi negatif (*"isu yang tidak benar"*) terhadap aspirasi pengawasan yang disuarakan warga. Pendekatan ini merefleksikan watak wacana yang memandang partisipasi masyarakat semata-mata sebagai tantangan terhadap reputasi yang harus segera direpresi.

Ditinjau dari model SPEAKING, terjadi pergeseran orientasi dalam nada tuturan (*Key*) dari posisi adaptif menjadi preskriptif-direktif. Tujuan tuturan (*Ends*) di sini tidak lagi sekadar mengklarifikasi postur anggaran, melainkan diarahkan untuk membangun demarkasi pelindung (*boundary setting*) yang membatasi pergerakan partisipan pengkritik (*Participants*). Sarana penyampaian (*Instrumentalities*) difungsikan sebagai medium komunikasi asimetris untuk menciptakan batas wacana di ranah publik. Situasi tutur ini mengkonstruksi relasi kuasa ketika institusi publik menempatkan posisinya menyerupai korporasi swasta yang menuntut perlakuan protektif atas citranya. Penerapan gaya komunikasi pelayanan pelanggan (*customer service*) yang defensif ini menemui kendala struktural di ruang publik demokratis, karena mengawasi penggunaan APBD merupakan domain konstitusional warga negara, bukan sekadar komplain konsumen komersial.

Berdasarkan temuan analisis sosiopragmatik dan pemetaan SPEAKING di atas, simpulan subbab ini menunjukkan bahwa pola tutur tersebut tidak merepresentasikan niat jahat (*mens rea*), tetapi mencerminkan *linguistic insensitivity* dalam mengelola manajemen krisis komunikasi pemerintahan. Pemanfaatan strategi direktif pembatasan wacana ini beroperasi sebagai instrumen perlindungan reputasi yang menempatkan partisipasi warga layaknya ancaman eksternal. Sebagai temuan utama, gaya komunikasi defensif yang mengabaikan fungsi dialog partisipatif tersebut berpotensi memicu resistensi komunal, memperlebar ketegangan kelas sosial, serta meruntuhkan legitimasi moral penguasa di mata kelompok masyarakat sipil.

Logika Krisis Manajemen Korporat

Secara teoretis, penerapan logika krisis manajemen korporat dalam sektor publik merujuk pada adopsi taktik penanganan krisis ala entitas bisnis swasta (*corporate damage control*), ketika pimpinan organisasi kerap menggunakan instrumen kompensasi finansial personal untuk meredam penurunan citra institusi secara instan (Coombs, 2007; Utz, S., Schultz, F., & Glocka, 2013). Dalam literatur komunikasi krisis dan kehumasan strategis, pendekatan ini sering kali mengabaikan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur tata kelola di hulu dengan menggantinya melalui klaim tanggung jawab etis-personal (*impression management*) (Coombs, W. T., & Holladay, 2002). Akibatnya, mekanisme akuntabilitas publik yang formal tereduksi menjadi sekadar penyelesaian transaksional. Dinamika diskursif ini menguat seiring gelombang kritik publik yang dipicu oleh terungkapnya rincian anggaran renovasi rumah dinas gubernur senilai Rp25 miliar yang juga mencakup pengadaan fasilitas non-esensial berupa kursi pijat dan akuarium air laut.

Paparan Data 5 [Kutipan Berita Media Daring *TribunMedan*, diterbitkan pada 22 April 2026]:

> *"Karena itu saya tidak mencari alasan, ini adalah tanggung jawab saya. [Saya menanggung biaya] sejumlah item rumah dalam renovasi di luar fungsi kedinasan [seperti kursi pijat dan akuarium]."* (Klarifikasi fasilitas rumah dinas) (Simanjorong, 2026).

Secara tekstual dan sosiopragmatik, pernyataan tersebut dipelajari melalui pembacaan institusional tandingan (*alternative institutional reading*) sebagai bentuk tanggung jawab moral dan iktikad baik kepala daerah agar keuangan daerah (APBD) tidak dibebani oleh fasilitas yang memicu kontroversi. Namun, pengujian lebih lanjut menunjukkan bahwa logika krisis manajemen korporat beroperasi dengan mengadopsi taktik penanganan masalah ala *Chief Executive Officer* (CEO) perusahaan swasta yang menggunakan pendekatan kompensasi finansial pribadi demi meredam penurunan citra. Dari sudut pandang sosiopragmatik, klaim menanggung biaya pribadi merupakan tindak tutur komisif yang difungsikan untuk pemulihan muka positif (*face-repairing act*). Pendekatan ini menunjukkan kendala pemahaman terkait akuntabilitas sektor publik, di mana indikasi maladministrasi pengadaan fasilitas tidak dapat dianulir secara kelembagaan hanya melalui kompensasi personal. Pejabat memosisikan dirinya sebagai penanggung jawab akhir finansial, namun strategi pemulihan muka ini berisiko kehilangan relevansinya (Ismaeel, 2026) karena respons yang diberikan belum menyentuh akar prosedural perencanaan anggaran di hulu tata kelola.

Dalam analisis etnografi komunikasi SPEAKING, pimpinan daerah berupaya mengubah orientasi tujuan tutur (*Ends*) dari pertanggungjawaban yuridis-administratif menjadi etalase tanggung jawab etis-personal. Urutan tindak tutur (*Act sequence*) disusun menggunakan pola pengakuan yang diikuti seketika oleh penawaran kompensasi material. Peserta tutur (*Participants*), yakni masyarakat luas, secara diskursif digiring untuk mengalihkan norma interpretasi (*Norms of interpretation*) dari tuntutan pembenahan prosedur lelang kepada apresiasi atas kesediaan pejabat membayar ganti rugi. Genre tuturan ini secara langsung mengadopsi bentuk klarifikasi manajerial yang lazim digunakan organisasi bisnis swasta ketika berhadapan dengan liabilitas keuangan publik. Penerapan *damage control* pragmatis-transaksional ini berpotensi mereduksi makna ketatnya kepatuhan terhadap prosedur administrasi negara.

Berdasarkan temuan analisis sosiopragmatik dan pemetaan SPEAKING di atas, simpulan subbab ini menunjukkan bahwa pola tutur tersebut tidak merepresentasikan niat jahat (*mens rea*), tetapi mencerminkan *linguistic insensitivity* dalam menerjemahkan etika

kepatuhan administrasi negara. Pemanfaatan tindak tutur komisif kompensasi finansial personal ala pimpinan korporasi ini beroperasi sebagai disonansi informasi administratif yang mengaburkan urgensi evaluasi prosedur pengadaan. Sebagai temuan utama, strategi resolusi krisis yang bertumpu pada penyelesaian transaksional berpotensi membiarkan kerentanan birokrasi tidak teratasi dan pada akhirnya gagal memulihkan kepercayaan publik (*public trust*) secara berkelanjutan.

Logika Tata Kelola Korporasi Keluarga (Family Governance)

Secara teoretis, adopsi logika tata kelola korporasi dan pencitraan merek (*corporate branding*) ke dalam sektor publik mencerminkan upaya transposal instrumen bisnis privat ke ruang birokrasi negara (Leijerholt, U., Biedenbach, G., & Hultén, 2019). Dalam kajian tata kelola kelembagaan, ketika prinsip korporasi diterapkan dalam birokrasi pemerintahan, simbol-simbol kehormatan dan legitimasi kelembagaan kerap direduksi serta dikuantifikasi melalui kemewahan aset fisik dan proyeksi citra elitis (Fairclough, 1993). Pengidentikan martabat institusi publik dengan kemewahan operasional ini sering kali berbenturan secara diametral dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat. Pemicu awal dari rangkaian polemik komunikasi birokrasi ini berakar pada rencana pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar pada akhir Februari 2026, yang memancing perdebatan publik terkait etika kepatutan di tengah kendala infrastruktur dasar daerah.

Paparan Data 6 [Kutipan Berita Media Daring *Tirto.id* dan *CNN Indonesia*, diterbitkan pada 23 dan 27 April 2026]:

> *"Kaltim adalah ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tapi juga global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobil kadarnya. Kita jaga marwahnya Kaltim."* (Justifikasi mobil dinas) (Daftar Kontroversi Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Berujung Aksi 21 April, 2026; Putsanra, 2026).

Secara tekstual dan sosiopragmatik, rasionalisasi anggaran transportasi tersebut dipelajari melalui pembacaan institusional tandingan (*alternative institutional reading*) sebagai argumen fungsional keprotokolan daerah; ketika Kaltim diyakini memerlukan sarana pimpinan yang representatif untuk menunjang penghormatan terhadap tamu kenegaraan. Namun, pengujian lebih lanjut mengungkap beroperasinya logika tata kelola *corporate branding* ketika leksikon abstrak mengenai kehormatan direduksi menjadi atribut fisik kebendaan. Dari sudut pandang sosiopragmatik, penutur melakukan penyempitan rujukan leksikal (*referential narrowing*) melalui eufemisasi. Leksikon *"marwah"* (kehormatan/harga diri moral) didegradasi maknanya dan dilekatkan secara metonimik pada kemewahan spesifikasi kendaraan operasional (*"mobil kadarnya"*). Konstruksi tindak tutur deklaratif yang berpadu dengan pertanyaan retoris ini memperlihatkan ketidakpekaan penutur dalam mengukur jarak sosial terhadap masyarakat lokal, di mana klaim representasi kebanggaan elitis tersebut berbenturan secara diametral dengan kondisi riil warga yang masih memperjuangkan akses infrastruktur dasar.

Analisis model SPEAKING memperlihatkan bagaimana pimpinan daerah membingkai latar dan suasana tutur (*Scene*) ke dalam skala representasi diplomatik tingkat tinggi (*"miniatur Indonesia"* dan *"tamu global"*). Nada tuturan (*Key*) berbentuk tanya retoris diusung untuk mendesak partisipan (*Participants*) agar menerima klaim urgensi fasilitas tersebut secara apriori. Penggunaan leksikon *"marwah"* sebagai sarana linguistik (*Instrumentalities*) ditujukan untuk membungkus pengadaan aset materiil ke dalam bungkus pembelaan harga diri daerah (*Ends*). Namun, praktik kebahasaan ini berbenturan keras dengan norma

interpretasi masyarakat (*Norms*), yang memandang bahwa martabat sebuah pusat pemerintahan baru seyogianya diukur dari pemerataan kesejahteraan warganya, bukan dari label harga kendaraan pimpinannya. Pengidentikan citra kelembagaan dengan kemewahan fasilitas operasional ini secara administratif terbukti tidak relevan ketika kementerian terkait di tingkat pusat pada akhirnya turun tangan merekomendasikan pembatalan pengadaan tersebut.

Berdasarkan temuan analisis sosiopragmatik dan pemetaan SPEAKING di atas, simpulan subbab ini menunjukkan bahwa pola tutur tersebut tidak merepresentasikan niat jahat (*mens rea*), tetapi mencerminkan *linguistic insensitivity* dalam menafsirkan simbol-simbol kepatutan di ranah sosial. Mekanisme penyempitan rujukan leksikal dan eufemisasi beroperasi sebagai taktik *corporate branding* yang justru mereduksi nilai integritas kelembagaan menjadi sekadar kemewahan aset fisik. Sebagai temuan utama, disonansi empati pada rasionalisasi anggaran ini terbukti gagal merebut persetujuan warga, memicu resistensi luas, dan secara langsung merugikan marwah tata kelola birokrasi pemerintahan daerah itu sendiri.

Sintesis Linguistik Forensik: Batas Inferensi Motif dan Kerentanan Kontekstual

Berbagai patologi diskursif yang lahir dari pemaksaan logika korporasi ini tidak dapat dipandang sebelah mata hanya sebagai kemerosotan etika komunikasi. Namun, secara metodologis, evaluasi kebahasaan ini dipisahkan secara tegas dari penetapan hukum positif. Oleh karena itu, penggunaan eufemisme, kakofoni wacana antarpejabat, dan rasionalitas instrumental tidak diklaim memiliki implikasi yang mengikat secara hukum positif. Analisis sosiopragmatik dan linguistik forensik membuktikan bahwa beruntunnya kontroversi komunikasi pejabat publik di Kaltim sebagai episentrum IKN tidak serta-merta didasari oleh *mens rea* (niat jahat) untuk merendahkan masyarakat. Patologi komunikasi tersebut lebih merepresentasikan wujud ketidakpekaan berbahasa (*linguistic insensitivity)* akibat proses transisi habitus wirausaha ke ekosistem birokrasi yang belum tuntas (Kusno, 2026a). Mengingat disfungsi komunikasi politik merupakan isu tata kelola struktural dan bukan sekadar kesalahan individu yang terisolasi (Juliansah & Sukmana, 2026), persoalan ini berpotensi menciptakan kerentanan sistemik bagi institusi jika terus dipertahankan.

Sejalan dengan prinsip kehati-hatian ilmiah, keterkaitan antara tuturan klarifikasi pejabat dengan dinamika respons masyarakat dirumuskan sebagai kerawanan kontekstual berbasis urutan peristiwa (*chronological context vulnerability*), bukan sebagai hubungan sebab-akibat deterministik-mekanis. Secara kronologis, ketidakselarasan antara realitas material dan bahasa artifisial pejabat mendahului munculnya perlawanan wacana yang agresif dari kelompok sipil di ruang publik. Dalam ekosistem digital yang terpolarisasi, tingginya disonansi empati pada masa krisis ini berpotensi memicu warganet melontarkan pelabelan emosional yang rentan menjerat ke dalam pasal-pasal pencemaran nama baik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Hartini et al., 2020). Akibatnya, kegagalan mengelola tata kelola wacana ini bukan saja mengikis legitimasi politik penguasa, melainkan menciptakan ruang kerentanan lahirnya embrio delik siber massal di episentrum Ibu Kota Nusantara.

KESIMPULAN

Krisis komunikasi publik di Kalimantan Timur sebagai episentrum IKN berakar dari benturan habitus penguasa serta transposisi logika korporasi. Analisis sosiopragmatik dan etnografi SPEAKING secara empiris membuktikan bahwa pernyataan pejabat memuat *pseudo-akomodasi*, pengalihan isu melalui statistik, serta penyempitan rujukan yang

merefleksikan ketidakpekaan berbahasa (*linguistic insensitivity*) tanpa mengindikasikan niat jahat (*mens rea*). Disfungsi tata kelola bahasa ini secara pragmatis berisiko memperlebar jarak sosiologis, memicu resistensi komunal yang agresif, serta melahirkan potensi kerentanan delik siber. Oleh karena itu, pelembagaan Model Audit Linguistik Tata Kelola sangat mendesak diterapkan secara preventif di hulu komunikasi birokrasi guna mitigasi risiko hukum dan penyelamatan legitimasi institusi.

REFERENSI

Ashurov, B. S. (2026). Methodological and Analytical Approaches to Research Methods in Contemporary Forensic Linguistic Studies. *Scientific Electronic Journal "Foreign Languages in Uzbekistan*, *Vol. 12026*. https://journalfledu.com/

Carolina, L. A., & Mukti, A. (2020). Budaya Birokrasi Paternalisme di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, *4 (1)*, 35–45. https://doi.org/10.31002/jman.v4i1.885

Coombs, W. T., & Holladay, S. J. (2002). Helping crisis managers protect reputational assets: Initial tests of the situational crisis communication theory. *Management Communication Quarterly*, *16(2), 165–186*. https://doi.org/10.1177/089331802237233

Coombs, W. T. (2007). Protecting organization reputations during a crisis: The development and application of situational crisis communication theory. *Corporate Reputation Review*, *10(3)*, 163–176. https://doi.org/10.1057/palgrave.crr.1550049

Coulthard, M., & Johnson, A. (2007). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence* (1st ed.). Routledge.

Culpeper, J. (2011). *Impoliteness: Using Language to Cause Offence* (1st ed.). Cambridge University Press.

Daftar Kontroversi Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Berujung Aksi 21 April. (2026). CNNIndonesia.com. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260427113548-32-1352471/daftar-kontroversi-gubernur-kaltim-rudy-masud-berujung-aksi-21-april

Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Routledge.

Erdmann, G., & Engel, U. (2006). Neopatrimonialism Revisited: Beyond a Catch-All Concept. *GIGA Working Papers*, *16*, 1–39. https://doi.org/10.2139/ssrn.922037

Fairclough, N. (1993). Critical discourse analysis and the marketization of public discourse: The universities. *Discourse & Society*, *4(2)*, 133–168. https://doi.org/10.1177/0957926593004002002

Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. In P. Cole & J. Morgan (Ed.), *Syntax and Semantics, Vol. 3: Speech Acts* (pp. 41–58). Academic Press.

Gubernur Kaltim Respons Aksi 21 April: Masukannya Sangat Berkelas. (2026). CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260421204152-20-1350562/gubernur-kaltim-respons-aksi-21-april-masukannya-sangat-berkelas

Hartini, L., Saifullah, A. R., & Sudana, D. (2020). Linguistik Forensik Terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan di Media Sosial (Kajian Pragmatik). *Deiksis*, *12*(03), 259–269. https://doi.org/10.30998/deiksis.v12i03.5416

Hasbullah, H., & Wahyono, S. (2020). Budaya Paternalistik dalam Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Yustisia*, *21(2)*, 1–23. https://doi.org/10.53712/yustitia.v21i2.1016

Hayati, R. (2019). *Pengertian Studi Kasus, Jenis, Tujuan, dan Contohnya*. Penelitianilmiah.com.

Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x

Hussain, M., Khan, U., & Khan, M. A. (2025). Applied Linguistics and Law: A Review of Forensic linguistics Research Trends, Challenges, and Innovations. *Advance Social Science Archive Journal*, *4(1)*, 4046–4060. https://assajournal.com/index.php/36/article/view/886/1329

Ilhami, M. W., Nurfajriaani, W. V., Mahendra, A., & Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *Mei 2024,*. https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129

Ismaeel, I. T. (2026). The Pragmatic Functions of Apologies and Requests in Mobile-Based Role Play Scenarios. *Manar Elsharq Journal for Literature and Language Studies*, *4(3)*, 43–58. https://meijournals.com/ara/index.php/mejlls/article/download/1696/1596/1778

Iswatiningsih, D. (2016). Etnografi Komunikasi: Sebuah Pendekatan dalam Mengkaji Perilaku Masyarakat Tutur Perempuan Jawa. *Seminar Nasional Prasasti (Pragmatik: Sastra Dan Linguistik)*.

Juliansah, M. Y., & Sukmana, O. (2026). Political Communication Dysfunction: The Impact of Controversial Statements by Public Officials on Public Trust. *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, *Vol 2 No 1*, 50–62. https://scriptaintelektual.com/custodia/article/view/1190/1088

Kusno, A. (2025). *Linguistik Forensik Indonesia: Pengantar, Teori, dan Praktik* (Edisi I). RV Pustaka Horizon.

Kusno, A. (2026a). *Lidah Penguasa Nalar Jelata: Analisis Linguistik Forensik atas Isu Hukum dan Sosial* (Wahdatun Nisa (Ed.); I). RV Pustaka Horizon.

Kusno, A. (2026b). *Mari Beri Kesempatan*. Tribun Kaltim. https://kaltim.tribunnews.com/opini/1146607/mari-berikan-kesempatan

Kusno, A. (2026c). *Mari Berikan Kesempatan*. Kaltim Post. https://kaltimpost.jawapos.com/opini/2604290001/mari-berikan-kesempatan

Leech, G. (1993). *Prinsip-prinsip Pragmatik* (M. D. D. Oka (Ed.); I). Penerbit Universitas Indonesia.

Leijerholt, U., Biedenbach, G., & Hultén, P. (2019). Branding in the public sector: a systematic literature review and directions for future research. *Journal of Brand Management*, *26(2)*, 147–160. https://doi.org/10.1057/s41262-018-0116-2

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Mintowati, M. (2016). Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik. *Paramasastra*, *Volume 3 N*.

Moleong, L. J. (1994). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (25th ed.). PT Remaja Rosdakarya.

Okolie, A. M. (2012). Neo-patrimonialism and the discourse of state failure in Africa. *Review of African Political Economy*, *39(131)*, 27–41. https://doi.org/10.1080/03056244.2012.658719

Pasaribu, E., & Syamsuri, A. R. (2025). Dilema neo-patrimonialisme dalam birokrasi modern: Analisis pengisian jabatan struktural di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, *5(6)*, 2999–3010. https://doi.org/10.60036/jbm.879

Putsanra, D. V. (2026). *Daftar Kontroversi Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud hingga Didemo*. Tirto.id. https://tirto.id/daftar-kontroversi-rudy-masud-hingga-didemo-warga-kaltim-huJV

Rahardi, K. (2009). *Sosiopragmatik* (W. Hardani (Ed.); 5th ed.). PT Gelora Aksara Pratama.

Rahardi, K., Setyaningsih, Y., & Dewi, R. P. (2020). *Pragmatik: Fenomena Ketidaksantunan Berbahasa* (4th ed.). Penerbit Erlangga.

Rahayu, R. (2026). *Anggaran Makan Pemprov Capai Rp 10 M, Rudy Mas'ud Sebut Menurun*. Detikkalimantan. https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8461234/anggaran-makan-pemprov-capai-rp-10-m-rudy-masud-sebut-menurun

Rambe, N. F. Q., Attas, S. G. A., & Leiliyanti, E. (2026). Political Presidential Linguistic Strategic in Published, Discourse: A Literature of Review of Studies 2022--2026. *International Journal of Language and Culture*, *4 Nomor 1*, 32–39. https://doi.org/10.63762/ijolac.v4i1.54

Saifudin, A. (2020). Teori Tindak Tutur dalam Studi Linguistik. *LITE*, *Volume 15*, 1–16.

Saputra, E. (2026). *Bela Diri Soal Tunjuk Adik Jadi Tim Ahli, Gubernur Kaltim Bandingkan dengan Prabowo-Hashim*. Bangkapos.com. https://bangka.tribunnews.com/news/1682840/bela-diri-soal-tunjuk-adik-jadi-tim-ahli-gubernur-kaltim-bandingkan-dengan-prabowo-hashim

Simanjorong, S. A. (2026). *Akuarium Air Laut dan Kursi Pijat Jadi Kontroversi, Rudy Mas'ud Janji Tanggung Pakai Uang Pribadi*. Tribun Medan.com. https://medan.tribunnews.com/news/1791748/akuarium-air-laut-dan-kursi-pijat-jadi-kontroversi-rudy-masud-janji-tanggung-pakai-uang-pribadi?page=3#google_vignette

Utz, S., Schultz, F., & Glocka, S. (2013). Crisis communication online: How medium, crisis type and emotions affected public reactions in the Fukushima Daiichi nuclear disaster. *Public Relations Review*, *39(1)*, 40–46. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2012.09.010

Wulandari, S. (2022). *Pembangunan IKN di Kaltim Memerlukan Infrastruktur Sosial*. Diskominfo Kaltim. https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/pembangunan-ikn-di-kaltim-memerlukan-infrastruktur-sosial

Zhang, K. (2021). *Teori Administrasi Publik: Rasionalitas Instrumental dan Nilai (Terjemahan oleh A. H. I. Tjan dkk.)*. Penerbit Gramasurya.